

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pendidikan juga merupakan hak mendasar bagi seluruh warga Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, hingga keterampilan yang diperlukan dirinya.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 dijelaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Diperjelas dalam pasal 54, bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa selain oleh pemerintah, pendidikan pun dapat diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat.

Salah satu bentuk pendidikan yang dapat dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat adalah sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam terjadinya sebuah proses pendidikan karena yayasan pendidikan didirikan untuk mencapai tujuan mendidik generasi muda agar tidak tertinggal dan menjadi berpikir maju.

Sebuah Yayasan Pendidikan tentu membutuhkan dana guna menjalankan aktivitasnya. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pasal 26 disebutkan bahwa sumber kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang yang dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan pendidikan tidak terlepas dari kegiatan menghimpun dan mengelola dana dari siswa untuk keperluan operasional baik untuk membayar sewa gedung,

gaji pengajar yayasan, maupun untuk membeli sarana dan prasarana. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 setiap satuan pendidikan formal maupun nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yayasan pendidikan perlu menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran dalam proses belajar mengajar.

Yayasan pendidikan perlu dikelola serius dengan melakukan pencatatan salah satunya atas pembelian sarana dan prasarana (Maulana & Mahmuda, 2019). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pasal 49 yang menyebutkan bahwa pengurus yayasan wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat laporan keadaan yayasan dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Guna menjalankan amanat undang-undang tentang yayasan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pembelian sarana dan prasarana, yayasan pendidikan dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Rizky & Padmono, 2013).

Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang yayasan dengan tujuan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas untuk organisasi sektor nirlaba (yayasan). Organisasi sektor nirlaba (yayasan) dituntut untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi kepada publik sebagai sarana pemberian informasi dalam rangka memenuhi hak-hak pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan mengharapkan transparansi dan akuntabilitas untuk mengetahui alur transaksi agar dapat menilai dan menentukan tindakan di masa yang akan datang pada suatu entitas.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 diatur pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Hal ini memperkuat bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana melalui penyajian laporan keuangan untuk yayasan pendidikan perlu di masif kan. Lebih lanjut dalam Undang-undang yayasan Nomor 28 Tahun 2004 pasal 52 menyebutkan bahwa yayasan wajib di audit oleh Akuntan Publik bagi yang memperoleh bantuan negara,

bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau lebih; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah) atau lebih.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi penting untuk organisasi sektor nirlaba, dikarenakan masyarakat menginginkan penjelasan ke mana dana yang disetorkan akan disalurkan (Churniawati & Suryono, 2018). Pengurus yayasan sering kali dijumpai pada portal berita *online* melakukan tindakan penggelapan dana. Seperti contoh kasus yang terjadi di STKIP Bima, lima pengurus Yayasan ditetapkan sebagai tersangka atas penggelapan uang kas Yayasan hingga 19 miliar lebih setelah dilakukan Audit Independen (Nickyrawi, 2021). Oleh karena itu, Akuntabilitas dan Transparansi menjadi hal yang penting untuk sektor nirlaba (yayasan).

Kondisi yayasan yang baik merupakan kekuatan bagi suatu yayasan untuk dapat bertahan dan berkembang demi tercapainya tujuan yayasan. Pengelolaan aset yang benar diharapkan dapat meningkatkan kinerja aset. Pelaksanaan pengelolaan aset tetap sebagai sarana dan prasarana digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya kegiatan aset tetap, mengenai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, atau efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan yayasan (Atikoh et al., 2017).

Sarana dan prasarana memiliki nilai yang materiil dibandingkan dengan aktiva lain karena transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian sarana dan prasarana biasanya menggelontorkan sejumlah uang yang cukup besar karena harga sarana dan prasarana umumnya relatif mahal. Oleh karena itu transaksi-transaksi terkait sarana dan prasarana harus dicatat dengan detail dan teliti.

Pencatatan pembelian sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran sangat penting dilakukan, sebab pencatatan dengan detail dan teliti sesuai dengan standar pelaporan keuangan, menjadi sarana akuntabilitas dan transparansi yayasan pendidikan, terlebih pengeluaran uang untuk pembelian sarana dan prasarana tidak dalam jumlah yang sedikit.

Ilmu akuntansi merupakan suatu ilmu yang membantu mengelola keuangan yang akuntabel dan transparan melalui penyajian laporan keuangan. Menurut

Hansen (2009) dalam (Permatasari et al., 2016) Akuntansi sangat diperlukan oleh yayasan pendidikan dalam hal memperoleh data-data keuangan yang penting dan kemudian menyampaikan dalam bentuk laporan. Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi antara pihak yang mengelola dana dengan para pemangku kepentingan dengan penyajian yang relevan, akuntabel, dan berkesinambungan. Laporan keuangan menyajikan informasi meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan guna pengambilan keputusan (Utomo & Qomariah, 2014).

Pada praktiknya entitas memiliki keunikan masing-masing dalam kegiatan operasionalnya. Keunikan tersebut akan berpengaruh terhadap laporan keuangan (Ciuhureanu, 2016). Maka dari itu perlu adanya kontrol yang mengawasi keunikan tersebut agar tidak melenceng jauh dari tujuan yang diharapkan. Bentuk kontrol yang dapat diterapkan adalah melalui pengendalian internal yang sesuai dengan keunikan entitas tersebut. Pengendalian internal merupakan suatu set prosedur yang dirancang untuk memberikan batasan kegiatan agar tidak dilakukannya hal yang tidak perlu guna mencapai tujuan entitas (Danescu et al., 2013). Dengan pengendalian internal yang baik, *output* laporan keuangan yang dihasilkan akan sejalan dengan pengendalian internal yang diterapkan.

Kebijakan akuntansi diperlukan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan terjemahan dari suatu pengendalian internal untuk suatu entitas yang disesuaikan dengan kondisi lapangan entitas. Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi merupakan hal yang sangat penting sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan, karena dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan kebijakan akuntansi menjadi dasar dalam proses pembuatan Laporan Keuangan (Hamzah et al., 2019). Laporan keuangan yang berkualitas akan tercapai ketika suatu set prosedur kebijakan yang dapat diuraikan dengan baik yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan Akuntansi merupakan bentuk

turunan dari standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Pedoman pembuatan Kebijakan Akuntansi tertuang dalam PSAK Nomor 25 revisi 2009 yang menjelaskan pemilihan dan penerapan terkait kebijakan akuntansi.

Penerapan kebijakan akuntansi salah satu tujuannya digunakan untuk melindungi aset-aset entitas seperti tindakan pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau salah penempatan, dan dapat memberikan informasi atas laporan keuangan yang mencerminkan nilai aset tetap perusahaan, informasi yang akurat sangat penting demi kesuksesan suatu entitas. (Radiansyah & Syahrozi, 2020). Selain itu, kebijakan akuntansi juga sebagai pedoman pelaksanaan bagi pelaksana pelaporan aset tetap dalam melaksanakan kegiatan agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan proses pelaporan terkait kondisi dan nilai aset tetap pada laporan keuangan (Hamzah et al., 2019).

Aset tetap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah yayasan pendidikan yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat dan mendorong tercapainya tujuan dari yayasan pendidikan tersebut. Menurut PSAK Nomor 16 revisi 2015, Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Sarana dan prasarana dalam yayasan pendidikan tergolong dalam definisi aset tetap. Menurut Rohiat (2006) dalam buku Manajemen Pendidikan Karya (Suhelayanti et al., 2020), sarana dan prasarana adalah semua benda atau barang yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai penunjang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung.

Sarana dan prasarana yang tergolong dalam aset tetap sebagai penunjang pembelajaran terdiri dari gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, meubelair,

buku-buku pembelajaran, alat praktik sains, alat-alat olahraga, barang elektronik seperti proyektor dan komputer, serta kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Salah satu perhatian utama bagi yayasan pendidikan adalah upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan aset yang baik. Pentingnya peranan aset tetap dan besarnya dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, maka dibutuhkan perlakuan yang baik dan benar terhadap setiap aset tetap yang dimiliki oleh yayasan pendidikan (Ruata et al., 2018).

Kesalahan dalam pencatatan, perhitungan, dan perlakuan aset tetap dapat memberikan dampak jangka panjang dalam laporan keuangan karena aset tetap dibukukan dan berada dalam catatan akuntansi yayasan dalam beberapa tahun sesuai dengan masa manfaat aset tetap tersebut (Atikoh et al., 2017). Kesalahan ini akan terlihat dalam neraca atau laporan posisi keuangan yang dapat mengakibatkan informasi posisi keuangan suatu entitas tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Kesalahan dalam pencatatan aset tetap juga berdampak pada tidak wajarnya laporan keuangan yang disajikan.

Manajemen aset yang baik mencerminkan bahwa yayasan mampu mengendalikan kinerja keuangannya secara efektif dan efisien. Menurut penelitian yang dilakukan (Purba & Bimantara, 2020) yang mengkaji *Fixed Asset Turnover* (FATO) terhadap *Return on Asset* (ROA) diperoleh bahwa FATO berpengaruh positif terhadap ROA yang akan mendorong manajemen perusahaan untuk mengelola aset tetap dengan baik.

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu alat dalam mencapai tujuan dari yayasan pendidikan. Yayasan harus memperhatikan aset tetapnya dengan baik dikarenakan aset tetap merupakan alat penunjang pembelajaran demi kenyamanan dan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Maka dapat dikatakan bahwa aset tetap menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah yayasan pendidikan.

Yayasan Assakinah Sejahtera merupakan yayasan pendidikan islam yang berada di Kabupaten Bandung Barat yang menaungi Lembaga Pendidikan dari tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah

(MTs), Madrasah Aliyah (MA), Tahfidz Anak Usia Dini Sahabat Qur'an (TAUD SaQu), hingga Sekolah Pendidikan Khusus (SPKh). Yayasan Assakinah Sejahtera dalam rangka mencapai akuntabilitas dan transparansi publik serta amanah dari dewan pembina yayasan sebelumnya, ingin mempunyai laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu faktor laporan keuangan yang berkualitas adalah aset tetapnya.x

Yayasan Assakinah Sejahtera memiliki nilai Aset Tetap yang sangat besar, hal ini dapat dilihat dari nilai tanah dan gedung dan bangunannya. Tanah yang dimiliki Yayasan Assakinah Sejahtera senilai Rp 6.527.517.000-, dan untuk gedung dan bangunannya senilai Rp 44.077.060.000-,. Yayasan Assakinah Sejahtera juga memiliki sejumlah Aset Tetap lainnya yang tersebar di unit-unit sekolah seperti Meubelair, Alat Elektronik, Alat Olahraga, Alat Praktik Sains, dan Buku-buku pelajaran yang nilainya sangat signifikan. Yayasan Assakinah Sejahtera juga memiliki beberapa kendaraan roda dua dan roda empat guna menunjang operasional Yayasan dalam melakukan perjalanan dinas yang nilainya pun sangat signifikan.

**Tabel I.1**  
Rekapan Tanah dan Bangunan

<b>ASET TETAP</b>		
<b>TANAH &amp; BANGUNAN</b>		
<b>YAYASAN ASSAKINAH SEJAHTERAH</b>		
<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Nilai</b>
1	Tanah	Rp 6.527.517.000-,
2	Gedung & Bangunan	Rp 44.077.060.000-,
	<b>Total</b>	<b>Rp 50.604.577.000-,</b>

*Sumber: Data yang sudah diolah*

Dengan nilai valuasi yang sangat besar dan jumlah aset tetap yang sangat banyak seperti meja, kursi, papan tulis, komputer, proyektor, lemari, alat-alat olahraga, alat-alat praktik sains, dan buku-buku yang tersebar di unit-unit lembaga pendidikan Yayasan Assakinah Sejahtera, pengendalian atas aset tetap tersebut akan sulit untuk dilakukan. Pengelolaan aset tetap yang buruk akan berdampak pada laporan keuangan. Kesulitan dalam pengendalian tersebut akan menimbulkan

kesalahan dalam pencatatan, pengakuan, dan pengukuran terhadap aset tetap pada laporan keuangan. Oleh sebab itu, aset tetap harus dikelola dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Yayasan Assakinah Sejahtera bersama penanggung jawab aset tetap dan bagian keuangan yayasan, diperoleh bahwa Yayasan Assakinah Sejahtera belum melakukan pengelolaan aset tetap dengan baik. Ditemukan bahwa, Yayasan Assakinah Sejahtera belum mempunyai kebijakan terkait aset tetap. Dalam PSAK 16 paragraf 9 mengatakan bahwa pernyataan dalam PSAK 16 tidak menentukan batasan nilai/ukuran dalam pengakuan suatu aset tetap, maka dari itu diperlukan pertimbangan kriteria sesuai dengan kondisi entitasnya. Lebih lanjut dalam paragraf 10 entitas perlu mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan terkait biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya, biaya-biaya tersebut termasuk biaya untuk memperoleh, menambah, mengganti, atau memperbaikinya. Oleh karena itu kebijakan kapitalisasi aset perlu dibuat sebagai pertimbangan manajemen dalam melakukan pengakuan atas biaya yang dikeluarkan baik untuk memperoleh maupun memperbaiki yang mengakomodir masalah pengakuan terkait aset tetap yang sesuai dengan kondisi entitas.

Selanjutnya, ditemukan bahwa unit-unit seperti MI, Taud Saqu, dan *Boarding School* masih belum melaporkan semua aset tetap yang dimiliki oleh unit tersebut kepada manajemen Yayasan Assakinah Sejahtera. Unit-unit yang masih belum melaporkan aset tetapnya pada manajemen yayasan mengakibatkan nilai aset tetap yang tersaji tidak menggambarkan aset tetap secara keseluruhan pada laporan keuangan yang telah dibuat oleh bagian keuangan yayasan. Hal tersebut akan bertentangan dengan PSAK 16 paragraf 74 poin d, yang mengatur pencatatan pengakuan aset tetap yang dimiliki oleh entitas harus disajikan secara jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan. Unit-unit tersebut terkendala sumber daya manusia untuk melakukan inventarisasi aset tetap, hal tersebut yang mengakibatkan unit-unit tersebut belum melaporkan daftar inventaris aset tetap kepada manajemen Yayasan Assakinah Sejahtera.

**Tabel I.2**  
Neraca Yayasan Assakinah Sejahtera

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>		
<b>ASET TETAP</b>		
<b>YAYASAN ASSAKINAH SEJAHTERA</b>		
Tanah	Rp 11.808.000.000	
Bangunan	Rp 21.256.907.954	
Akumulasi Depresiasi Peny Bangunan	Rp (7.390.978.518)	
Peralatan Kantor	Rp 526.490.998	
Akumulasi Depresiasi Peny Peralatan	Rp (769.142.088)	
Meubelair	Rp 1.795.389.917	
Akumulasi Depresiasi Peny Meubelair	Rp (1.375.120.638)	
Kendaraan	Rp 219.635.540	
Akumulasi Depresiasi Peny Kendaraan	Rp (92.181.008)	
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>Rp 25.979.002.158</b>

*Sumber: Data yang sudah diolah*

Pada PSAK 16 paragraf 76, menjelaskan bahwa pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset perlu adanya pertimbangan, oleh karena itu perlu diungkapkan sebagai bahan *review* kebijakan oleh manajemen. Yayasan Assakinah Sejahtera telah melakukan perhitungan penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya, namun berdasarkan observasi metode penyusutan yang digunakan belum tercantum pada catatan atas laporan keuangan. Perhitungan penyusutan dilakukan secara kumulatif dengan cara membagi total aset tetap dibagi umur ekonomis jenis aset tetap tersebut. Hal ini bertentangan dengan PSAK 16 paragraf 45 bahwa Entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset pada bagian aset tetap yang signifikan dan menyusutkan secara terpisah setiap bagian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal bersama dengan Dewan Pembina Yayasan Assakinah Sejahtera, Bendahara Yayasan Assakinah Sejahtera, dan Penanggung Jawab Aset Tetap Yayasan Assakinah Sejahtera, mereka berpendapat bahwa pengendalian internal terhadap aset tetap belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pengetahuan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pengendalian terhadap aset tetap yang dimiliki oleh Yayasan Assakinah Sejahtera. Proses pencatatan pada laporan keuangan terkait akun aset tetap hanya berdasarkan pada data pembelian aset tetap

yang dimiliki oleh manajemen yayasan yang didapat dari unit-unit yang dinaungi oleh yayasan Assakinah Sejahtera. Adapun Yayasan Assakinah Sejahtera belum memiliki kebijakan akuntansi aset tetap yang mengatur terkait pengelolaan aset tetap.

**Tabel I.3**  
Hasil Wawancara Awal

Instrument	Hasil Wawancara
Pembelian Aset Tetap	Pembelian aset tetap dilakukan oleh setiap unit-unit seperti RA, MI, MTs, MA, SPKh, Taud Saqu, <i>Boarding School</i> , dan Kantor Yayasan melalui dana BOS maupun SPP siswa. Aset tetap langsung ditempatkan di unit-unit ketika datang.
Pencatatan	Pencatatan dilakukan satu pintu oleh penanggung jawab aset tetap kantor yayasan dan bendahara yayasan yang diperoleh dari faktur pembelian yang dikumpulkan oleh tiap unit dan daftar rincian aset tetap yang dimiliki oleh yayasan assakinah Sejahtera belum tertata secara rapih
Pengelolaan Aset Tetap	Pengelolaan aset tetap oleh Yayasan Assakinah Sejahtera belum dilakukan dengan baik, seperti tidak adanya pengecekan aset tetap secara berkala yang mengakibatkan banyak aset tetap yang rusak ringan dibiarkan saja tanpa ada itikad perbaikan dan tidak memiliki gudang penyimpanan untuk aset tetap yang rusak total sehingga aset yang rusak total dibiarkan di ruangan di mana aset tersebut berada
Sumber Daya Manusia	Sumber daya manusia pada Yayasan Assakinah Sejahtera belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan aset tetap yang baik dan benar dan kekurangan sumber daya

Instrument	Hasil Wawancara
	mengakibatkan tidak dilakukannya pengecekan aset tetap secara berkala.
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	Yayasan Assakinah Sejahtera belum membuat kebijakan akuntansi yang mengatur bagaimana pengelolaan aset dari tahap perolehan sampai pencatatan.

*Sumber: Data yang sudah diolah*

Sejalan dengan misi “Memenuhi serta meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana, prasarana, pelayanan dan IT dalam menunjang proses Pendidikan yang menyenangkan berbasis SATF (teladan Akhlak Rasul SAW)” Yayasan Assakinah Sejahtera perlu membuat suatu Kebijakan Akuntansi terkait Aset Tetap guna melakukan pengendalian terhadap aset yang dimiliki. Terlebih aset tetap yang dimiliki oleh Yayasan Assakinah Sejahtera memiliki nilai yang sangat besar dan sangat kompleks. Dibuatnya Kebijakan Akuntansi terkait Aset Tetap dapat menjadi pedoman untuk manajemen yayasan dalam melaporkan aset tetap pada laporan keuangan sebagai akuntabilitas terhadap publik.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, Peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan aset pada Yayasan Assakinah Sejahtera sebagai akuntabilitas dan transparansi melalui penyajian laporan keuangan. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Perancangan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Dalam Rangka Akuntabilitas Pengelolaan Aset (Studi Kasus Pada Yayasan Assakinah Sejahtera)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rancangan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap di Yayasan dalam rangka akuntabilitas pengelolaan aset Assakinah Sejahtera?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Yayasan Assakinah Sejahtera dalam rangka akuntabilitas pengelolaan aset.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun dengan adanya pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi gambaran pemikiran dalam mendukung pengembangan teori yang ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Kebijakan Akuntansi terkait Aset Tetap khususnya pada Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada Yayasan Assakinah Sejahtera.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman dan memperoleh gambaran nyata dari penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam bidang Akuntansi Keuangan khususnya mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap di Yayasan Assakinah Sejahtera..

b. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dokumentasi dipergustakaan untuk digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

c. Yayasan Assakinah Sejahtera.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan bahan evaluasi dalam pengelolaan aset tetap di Yayasan Assakinah Sejahtera.

d. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan topik yang berkaitan dengan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

e. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada para pembaca mengenai pendampingan pembuatan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab utama, yaitu sebagai berikut:

### Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dipaparkan hal-hal yang menjadi dasar latar belakang penelitian ini dilakukan.

### Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan literatur mengenai teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu: *agency theory* dan *stakeholder theory* sebagai dasar dari *grand theory*, lalu teori-teori yang berkaitan seperti kebijakan akuntansi, laporan keuangan, dan aset tetap. Terdapat pula ringkasan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini dan Kerangka Pemikiran yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

### Bab 3 : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, lalu uraian jenis penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian, sumber data dan narasumber, prosedur pengumpulan data, juga teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan rancangan kebijakan akuntansi aset tetap aset tetap Yayasan Assakinah Sejahtera

yang berisi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan.

#### Bab 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisikan simpulan dari hasil dan pembahasan perancangan kebijakan akuntansi aset tetap Yayasan Assakinah Sejahtera. Bab ini juga berisi implikasi hasil penelitian serta saran-saran yang terkait dengan penelitian.